

**PERSEPSI KETIDAKADILAN SOSIAL MASYARAKAT:  
STUDI KASUS PENAMBANGAN ANDESIT DALAM  
PROYEK BENDUNGAN BENER DESA WADAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi**

**Disusun Oleh:**

**Ashfi Mazida Maula**

**NIM 21107020031**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2025**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-5282/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI KETIDAKADILAN SOSIAL MASYARAKAT: STUDI KASUS  
PENAMBANGAN ANDESIT DALAM PROYEK BENDUNGAN BENER DESA  
WADAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASHFI MAZIDA MAUILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21107020031  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., P.hD.  
SIGNED

Valid ID: 694dc4f243fa3



Penguji I

Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 69506317c440b



Penguji II

Nisrina Muthahari, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 694fb5b2e5f2f



Yogyakarta, 19 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6951f26321d24

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ashfi Mazida Maula  
NIM : 21107020031  
Program Studi : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Persepsi Ketidakadilan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Penambangan Andesit dalam Proyek Bendungan Bener Desa Wadas** ini benar *asli* hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Yang menyatakan,



Ashfi Mazida Maula  
NIM.21107020031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ashfi Mazida Maula

NIM : 21107020031

Prodi : Sosiologi

Judul : Persepsi Ketidakadilan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Penambangan Andesit dalam Proyek Bendungan Bener Desa Wadas

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosiologi.

Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam munaqosyah.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

NIP: 19761210 200801 2 008



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali halaman persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Alm. Nur Rosyid, seseorang yang biasa saya sebut bapak, yang selalu menjadi kerinduan dan alasan terbesar saya untuk tidak menyerah. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud mimpi yang ingin saya lanjutkan, mimpi untuk menyandang gelar yang sama seperti Bapak. Meskipun Bapak telah tiada—teladan, semangat, dan cinta yang Bapak tinggalkan tetap menjadi arah yang menuntun setiap langkah saya.
2. Untuk Ibu saya, Ani Rubaingatun Rofiqoh. Wanita hebat yang selalu menjadi kekuatan saya. Terima kasih atas cinta, doa, dan perjuangan yang tidak pernah berhenti demi masa depan saya. Ibu adalah sosok yang ingin saya teladani—tegar, penuh kasih, dan selalu menjadi rumah yang menenangkan.
3. Untuk adikku tersayang, Ashif Alfaruq, yang selalu menjadi alasan untuk terus kuat dan pulang. Terima kasih telah menjadi sumber tawa, penyemangat diam-diam, dan teman berbagi dalam segala masa. Semoga mba bisa menjadi contoh yang baik, memberi jalan, dan menjadi tempatmu kembali ketika dunia terasa berat. Mba bangga atas dirimu, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk langkah-langkah kecilmu.
4. Untuk diri saya sendiri, Ashfi Mazida Mauila, anak perempuan pertama yang diam-diam berjuang dan bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berani bermimpi, terus berjalan meski sering lelah, dan tetap menjadi diri sendiri. Kau boleh memiliki hati yang kecil, tetapi impianmu harus selalu besar. Semoga setiap langkahmu dikuatkan, dikelilingi kebaikan, dan mengantarmu pada mimpi-mimpi yang satu per satu akan terwujud. Aku bangga padamu—atas proses, keberanian, dan perkembanganmu yang semakin membawa dirimu menjadi versi terbaik.

## MOTTO HIDUP

*“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”*

**(Baskara Putra—Hindia)**

*“Long Story Short, I Survived”*

**(Taylor Swift)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Ketidakadilan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Penambangan Andesit dalam Proyek Bendungan Bener Desa Wadas”**.

Penyusunan tugas akhir ini merupakan perjalanan panjang yang tidak mudah. Namun dengan usaha serta dukungan dari banyak pihak, penulis mampu melewati setiap prosesnya hingga selesai. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Erika Setyani Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
4. Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian, yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
5. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan demi kesempurnaan kepenulisan, dan penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Prodi Sosiologi, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah membantu proses pengambilan data, Sofiyatul Mukaromah dan Rahmat Nurul Khatami. Terima kasih sudah meluangkan waktu, menemani perjalanan penelitian yang penuh tantangan, dan memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Kehadiran kalian membuat proses ini terasa lebih mungkin untuk dijalani.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta. Terima kasih karena selalu menjadi rumah paling aman untuk kembali, tempat yang tidak pernah kehabisan doa, dukungan, dan cinta. Segala kekuatan yang penulis miliki hari ini tidak pernah lepas dari pengorbanan dan kesabaran kalian. Terima kasih sudah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan, belajar, dan akhirnya sampai di tahap ini.
9. Untuk sahabat-sahabat terdekat, Dian Dwi Arini, Syifa Sabrina, Afanin Nuria Rifdah, Aisyah Nur Halimah, Nuzulul Putri Ramadhani, Umi Afifah, Alike Rahmah, Lailatul Afifah, Subhan Gufron, Adam Derbyan'syah, Fairuz Nafis Putranto, terima kasih sudah menjadi ruang aman untuk berbagi beban, tertawa tanpa alasan, dan beristirahat dari segala tekanan. Terima kasih karena selalu hadir ketika penulis hampir menyerah dan tahu cara menguatkan tanpa perlu diminta. Kehadiran kalian benar-benar membuat perjalanan ini lebih hangat.
10. Untuk sahabat seperjuangan, Aura Azahra, Uci Nurnisa Damanik, Tri Isnaeni Ades Ria, Shinta Dewi, Zindagia Mu'tiyantami Al Mubiqoti Aef, Rima Alfinnur terima kasih sudah menemani hari-hari penuh draft, revisi, dan rasa ingin menyerah yang datang berulang-ulang. Terima kasih atas saling menguatkan, saling mengingatkan, dan rasa kebersamaan yang membuat proses ini terasa tidak sendirian.
11. Untuk teman-teman Sosiologi angkatan 2021, terima kasih untuk segala cerita yang tumbuh sepanjang perjalanan kuliah—tawa, tekanan, kerja kelompok, hingga momen-momen kecil yang entah kenapa begitu berarti. Semoga langkah kita selanjutnya selalu dimudahkan.

12. Dan untuk teman-teman, Sri, Anggar, Afina, Indi, Hani, Sylma, Umi, Fauzi, Bayu, Azzami, Achmad, terima kasih atas kebersamaan yang tulus, tawa yang selalu muncul di tengah lelah, dan pengalaman berharga yang menambah warna dalam perjalanan penulis selama kuliah.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, dan motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Peneliti,



**Ashfi Mazida Maula**  
NIM.21107020031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II .....</b>	<b>32</b>
<b>GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
1. Profil Desa Wadas.....	32
2. Potensi Sumber Daya Andesit.....	33
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat .....	34
4. Dinamika Konflik Penambangan Andesit.....	35
B. Gambaran Umum Hasil Wawancara.....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN: PERSEPSI KETIDAKADILAN SOSIAL MASYARAKAT DESA WADAS TERHADAP PENAMBANGAN ANDESIT DALAM PROYEK BENDUNGAN BENER.....</b>	<b>41</b>
A. Relasi Sosial sebagai Implikasi Ketidakadilan .....	41

1. Faktor Pemicu Polarisasi: Mengapa Muncul Kubu Pro dan Kontra? ...	41
2. Solidaritas Sosial Pasca Konflik: Intra-Kelompok dan Solidaritas Komunal.....	46
B. Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Sosial.....	47
1. Bentuk-bentuk Ketidakadilan yang Didapatkan Masyarakat:.....	48
2. Penerimaan UGR Masyarakat.....	60
3. Partisipasi dan Bentuk Perlawanan Masyarakat .....	62
4. Respon dan Peran Pemerintah.....	65
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>ANALISIS PERSEPSI KETIDAKADILAN SOSIAL MASYARAKAT DESA WADAS TERHADAP PENAMBANGAN ANDESIT DALAM PROYEK BENDUNGAN BENER .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Relasi Sosial Pasca Penolakan Tambang .....	68
B. Analisis Keadilan Distribusi .....	72
C. Analisis Keadilan Pengakuan.....	76
D. Analisis Keadilan Partisipasi.....	78
E. Relevansi 3 Aspek Keadilan Nancy Fraser dalam Kasus Wadas .....	81
<b>BAB V.....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Sumbangan Penelitian.....	85
C. Keterbatasan Penelitian.....	86
D. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Wadas .....	32
Gambar 2.2 Aksi Demo Tahun 2022 .....	35
Gambar 2.3 Observasi Tambang Wadas.....	37



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi ketidakadilan sosial masyarakat Desa Wadas terhadap penambangan andesit yang merupakan bagian dari Proyek Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional(PSN). Penambangan andesit dipersepsikan masyarakat bukan sekadar aktivitas pembangunan, melainkan sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang hidup yang memicu konflik sosial dan penolakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam terhadap masyarakat yang menolak proyek, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat bersifat multidimensi. Pertama, ketidakadilan distribusi tampak pada pembagian manfaat dan risiko pembangunan yang tidak seimbang, khususnya terkait uang ganti rugi dan ancaman kerusakan ekologis. Kedua, ketidakadilan pengakuan muncul melalui pengabaian nilai tanah, identitas lokal, serta relasi spiritual masyarakat dengan ruang hidupnya. Ketiga, ketidakadilan partisipasi terlihat dari terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan lemahnya representasi politik warga. Selain memicu polarisasi dan ketegangan relasi sosial, konflik ini juga melahirkan solidaritas dan penguatan kohesi sosial di antara kelompok masyarakat penolak. Temuan ini menegaskan bahwa konflik pembangunan tidak selalu berujung pada disintegrasi sosial, melainkan dapat menghasilkan resiliensi sosial dalam kondisi tertentu. Dengan menggunakan teori keadilan sosial Nancy Fraser, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam konteks pembangunan modern tidak dapat dianalisis dalam satu aspek saja, melainkan harus dipahami secara multidimensi.

**Kata kunci:** Ketidakadilan Sosial, Persepsi Masyarakat, Penambangan Andesit, Bendungan Bener, Desa Wadas.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mewujudkan negara yang sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah harapan setiap negara yang ingin melangkah lebih maju seperti Indonesia.<sup>1</sup> Dalam perencanaannya pembangunan infrastruktur akan menjadi investasi kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, mengatasi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berorientasi pada kesejahteraan maupun lingkungan dalam jangka panjang.<sup>2</sup> Hal-hal ini sudah diatur dalam tatanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 tentang perencanaan dan percepatan pembangunan infrastruktur proyek-proyek besar di Indonesia.<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 menjelaskan Indonesia memiliki kebutuhan total investasi yang diperkirakan mencapai Rp4.796,2 triliun, tingginya kebutuhan total infrastruktur Indonesia ini menjadi pertimbangan perlunya penyusunan prioritas pembangunan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan inisiasi pembentukan Proyek Strategis Nasional atau yang selanjutnya disebut PSN.<sup>5</sup> PSN adalah proyek dan

---

<sup>1</sup> Portal Informasi Indonesia, “233 Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024,” 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8452/233-proyek-strategis-nasional-dorong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2024?lang=1>.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur,” 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-tekankan-pentingnya-pembangunan-infrastrukt>.

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024,” *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*, 2020, 313, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>.

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional Yang Miliki Manfaat Besar Dan Berdampak Luas,” 2023, [https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional \(PSN,krisis global pada 2008-2012](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN,krisis global pada 2008-2012).

<sup>5</sup> Ferry Andika Harmen, “Proyek Strategis Nasional, Dari Kita Untuk Bangsa,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca->



program yang dirancang oleh lembaga pemerintah atau badan usaha yang bersifat vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,<sup>6</sup> dalam koordinasinya PSN diawasi langsung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).<sup>7</sup> Tujuan dari dibentuknya PSN yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di berbagai sektor, khususnya pembangunan infrastruktur dengan target ketahanan pangan dan air, ketahanan energi, meningkatkan konektivitas, maupun digitalisasi.<sup>8</sup> PSN diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi global yang sempat terjadi pada tahun 2008 – 2012. Di tahun-tahun tersebut Indonesia mengalami krisis infrastruktur pada 38% dari PDB, sedangkan rata-rata negara maju pada angka 70%.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memasifkan pembangunan infrastruktur yang ditegaskan pada Perpres mutakhir No 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres No 3 Tahun 2016 mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.<sup>10</sup>

Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki target yang mencakup proyek-proyek berbagai sektor dan program strategis. Dalam pelaksanaannya, PSN telah menyelesaikan sebanyak 198 proyek, 32 proyek dan 10 program yang masih belum selesai, serta 44 proyek dan 3 program yang masih dalam tahap konstruksi. Tahun 2024, target pemerintah menyelesaikan 41 proyek dan program senilai Rp554 triliun yang meliputi pembangunan dalam berbagai

---

artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html.

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, *Perpres No 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2023.

<sup>7</sup> Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Peran KPPIP,” n.d., <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/#>.

<sup>8</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.”

<sup>9</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional Yang Miliki Manfaat Besar Dan Berdampak Luas.”

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” no. 050197 (2020).

sektor.<sup>11</sup> Dari target tersebut, PSN diharapkan dapat memberikan *Multiplier Effect* seperti, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan pekerjaan, maupun peningkatan layanan infrastruktur,<sup>12</sup> namun dari proyek dan program tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Dewi Anggraini, Dosen Fisip Unand, dalam seminarnya yang bertema “Tinjauan Kritis Atas Proyek Strategis Nasional: Antara Kebijakan Strategis Atau Bencana Sosial Ekologis” menyimpulkan bahwa Pembangunan PSN cenderung berdampak negatif daripada positif karena pembangunan yang ada tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Konflik agraria yang memunculkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah dalam PSN selalu meningkat dari tahun ke tahun. Contoh kasusnya seperti pada pembangunan kawasan industri Pulau Rempang Kota Batam yang dilatar belakangi oleh penggusuran tanah adat untuk rencana pembangunan Rempang Eco-City,<sup>14</sup> PLTU Batang di Jawa Tengah yang dilatarbelakangi oleh penolakan warga terhadap dampak proyek pada hilangnya mata pencaharian warga dan lingkungan yang rusak,<sup>15</sup> serta konflik perampasan lahan di Desa Wadas yang dipicu oleh adanya respon atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.<sup>16</sup> Dengan contoh-contoh penolakan tersebut, mendorong adanya

---

<sup>11</sup> Indonesia.

<sup>12</sup> Haryo Limanseto, “Selain Menjadi Upaya Pemeratan Pembangunan Di Seluruh Wilayah, Proyek Strategis Nasional Juga Mampu Berikan Dampak Multiplier Effect,” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5631/selain-menjadi-upaya-pemeratan-pembangunan-di-seluruh-wilayah-proyek-strategis-nasional-juga-mampu-berikan-dampak-multiplier-effect>.

<sup>13</sup> Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, “Tinjauan Kritis Atas Proyek Strategis Nasional : Antara Kebijakan Strategis Atau Bencana Sosial Ekologis,” 2024, <https://ilmupolitik.fisip.unand.ac.id/berita/tinjauan-kritis-atas-proyek-strategis-nasional-antara-kebijakan-strategis-atau-bencana-sosial-ekologis/#:~:text=Selain berdampak pada Masyarakat%2C PSN,alam seperti erosi dan banjir.>

<sup>14</sup> Satria Ardhi N, “Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat,” *Universitas Gadjah Mada*, 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.

<sup>15</sup> Benny Abidin, “Penolakan Warga Terhadap Proyek Pltu Batang: Telaah Sosiologi Hukum,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 134–44, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1095>.

<sup>16</sup> Kementerian Kajian Strategis Aksi dan Advokasi, “Komoditas Wadas Bernilai Tinggi,” *BEMUMY*, n.d., <https://bem.umy.ac.id/data-center-katanya-tanah-surga-di-desa-wadas-surga-untuk-rakyat-atau-oligarki/>.

bentuk perlawanan masyarakat terhadap hak-hak yang mereka punya. Bentuk perlawanan tersebut seringkali berupa protes maupun kampanye yang mengakibatkan bentrok terhadap pemerintah, hal ini didasari oleh ketegangan yang tidak seimbang. Masyarakat selalu ditempatkan dalam posisi bawah menghadapi tekanan seperti ujung tombak yang hanya tajam ke satu arah, padahal merekalah yang paling besar mengalami kerugian baik secara ekonomi dan lingkungan, maupun dampak sosial dan psikologis.<sup>17</sup>

Pembangunan Bendungan Bener menjadi salah satu yang masuk ke dalam 56 daftar proyek bendungan dan irigasi PSN<sup>18</sup> dengan fungsi utama sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Purworejo dan wilayah sekitarnya.<sup>19</sup> Bendungan yang berlokasi di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo ini direncanakan akan memiliki kapasitas 100.94 M<sup>3</sup> untuk mengairi lahan seluas 15069 Ha, pengendalian banjir hingga 210 M<sup>3</sup>/detik, sumber air dasar bagi rumah tangga sebesar 1,60 M<sup>3</sup>/detik, dan juga sumber daya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) hingga 6,00 MW.<sup>20</sup> Bendungan yang mulai dibangun pada tahun 2018 ini direncanakan selesai pada tahun 2026, dan ditargetkan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan tertinggi nomor dua di dunia dengan tinggi 169 meter.<sup>21</sup> Saat ini proses pembangunan fisik bendungan mencapai 39%, hal ini mencakup beberapa jembatan termasuk overpass dan underpass, terowongan pengelak yang digunakan untuk mengalihkan aliran sungai, *mercu spillway*, serta jalan akses

---

<sup>17</sup> “Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan Dari Implementasi PSN,” *Tempo.Co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/nalar-institute-ungkap-deretan-dampak-negatif-sosial-lingkungan-dari-implementasi-psn-408665>.

<sup>18</sup> Indonesia.

<sup>19</sup> Pemkab Purworejo, “Selain Penuhi Kebutuhan Air, Pembangunan Bendungan Bener Akan Berfungsi Sebagai Pengendali Banjir,” 2020, [https://www.purworejokab.go.id/web/read/1341/selain-penuhi-kebutuhan-air-pembangunan-bendungan-bener-akan-berfungsi-sebagai-pengendali-banjir.html?\\_im-tIHVqanr=3939563989256812424&\\_im-WjyqTccy=10880979142514869512](https://www.purworejokab.go.id/web/read/1341/selain-penuhi-kebutuhan-air-pembangunan-bendungan-bener-akan-berfungsi-sebagai-pengendali-banjir.html?_im-tIHVqanr=3939563989256812424&_im-WjyqTccy=10880979142514869512).

<sup>20</sup> Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Bendungan Bener,” n.d., <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/bendungan-dan-irigasi/bendungan-bener/>.

<sup>21</sup> Wahyu T.Rahmawati, “Waskita Karya (WSKT) Kebut Proyek Bendungan Bener, Progresnya Sudah 60,26%,” 2024, [https://investasi.kontan.co.id/news/waskita-karya-wskt-kebut-proyek-bendungan-bener-progresnya-sudah-6026#:~:text=Proyek Strategis Nasional \(PSN\) yang,sekitar Rp 571%2C2 miliar.](https://investasi.kontan.co.id/news/waskita-karya-wskt-kebut-proyek-bendungan-bener-progresnya-sudah-6026#:~:text=Proyek Strategis Nasional (PSN) yang,sekitar Rp 571%2C2 miliar.)

ke arah Desa Wadas.<sup>22</sup>

Permasalahan bermula saat Desa Wadas di informasikan akan dijadikan tempat pertambangan untuk mengambil material utama yang akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener, yaitu batuan andesit. Rencana penambangan andesit di Wadas ini muncul sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan bendungan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Penetapan lokasi pertambangan ini sudah dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, menurut Bapak Andri Kristanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, (1) Di Desa Wadas terdapat andesit yang cukup berkualitas, (2) Tersedianya batuan andesit yang cukup banyak, (3) Jarak antara lokasi pertambangan ke Bendungan Bener yang tidak terlalu jauh sekitar 10 – 11 km.<sup>23</sup> Kondisi tersebut memicu munculnya pro dan kontra di antara masyarakat, masyarakat pro bersedia menyerahkan lahan yang akan digunakan untuk pertambangan, sedangkan masyarakat kontra khawatir mengenai konsekuensi sosial dan lingkungan dari adanya proyek penambangan andesit, seperti terancamnya kehidupan sosial-budaya dan hilangnya makna hidup, karena bagi mereka tanah bukan hanya sumber ekonomi namun juga menjadi sebuah identitas yang memiliki makna. Kurangnya sumber mata air, hilangnya mata pencaharian, dan potensi longsor juga menjadi kekhawatiran karena mereka berada di kawasan Bukit Menoreh yang memiliki kerentanan terhadap bencana longsor.<sup>24</sup>

Penolakan terhadap penambangan andesit menimbulkan dinamika sosial yang membagi masyarakat menjadi 2 kubu. Penolakan ini mengeratkan hubungan yang mempertahankan lahan, tetapi juga memicu perbedaan dengan masyarakat yang mendukung proyek penambangan tersebut. Berdirinya

---

<sup>22</sup> Rinto Heksantoro, "Ditarget Kelar Akhir Tahun, Pembangunan Bendungan Bener Kini Mencapai 39%," *DetikJateng*, 2024, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7241971/ditarget-kelar-akhir-tahun-pembangunan-bendungan-bener-kini-mencapai-39>.

<sup>23</sup> Lusi Anasari and Dwi Harsono, "Dinamika Konflik Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo," *Journal of Public Policy and Administration Research* 8, no. 4 (2023): 17.

<sup>24</sup> Jurnal Hukum et al., "Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener" 3, no. 2 (2024).

Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) sebagai bukti nyata komitmen masyarakat menolak untuk tetap mempertahankan lahan mereka dari rencana penambangan batu andesit. Penolakan dikuatkan dengan masyarakat yang tak juga melihat pemerintah memperhatikan keadilan yang diharapkan masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek penambangan andesit, sebaliknya masyarakat terus diintimidasi dan diberikan tekanan untuk menyerahkan lahan mereka<sup>25</sup> dan berakibat pada ketegangan yang muncul dalam relasi sosial antara masyarakat dan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masalah-masalah keadilan ini sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu masalah distribusi/*redistribution*, pengakuan/*recognition*, dan partisipasi/*participation*.<sup>26</sup>

Urgensi yang ada membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Persepsi Ketidakadilan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Penambangan Andesit dalam Proyek Bendungan Bener Desa Wadas” dengan harapan dapat menganalisis konflik pembangunan melalui pengalaman sosial. Selama ini, penelitian mengenai konflik agraria dan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia cenderung berfokus pada aspek lingkungan, HAM, pelanggaran hukum, maupun ekonomi. Hal ini perlu juga melihat pada dimensi politik maupun budaya yang turut membentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan teori keadilan sosial dari Nancy Fraser untuk menganalisis masyarakat Desa Wadas dalam memaknai keadilan sosial serta bagaimana konflik memengaruhi struktur relasi yang terjadi disana. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat melengkapi kekurangan penelitian yang ada dan memberikan perspektif baru untuk memahami dampak sosial proyek pembangunan seperti ini.

---

<sup>25</sup> Diyan Sejarot and Achmad Hariri, “Konflik Agraria Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ‘ Studi Kasus Desa Wadas Purworejo ’ ” 2, no. 2 (2023): 151–66.

<sup>26</sup> Agung Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo , Jawa Tengah” 5, no. 1 (2022): 1–41, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>.



## **B. Rumusan Masalah**

Proyek Strategis Nasional(PSN) yang melibatkan Desa Wadas sebagai area penambangan batu andesit sebagai material pembangunan proyek, memunculkan konflik yang terjadi diantara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang diharapkan memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional nyatanya mengancam tatanan sosial, lingkungan, dan ruang hidup bagi masyarakat. Masyarakat menanggapi keadaan ini dengan berbagai penolakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketegangan terjadi bukan hanya karena persoalan UGR, namun mencakup pengabaian terhadap nilai-nilai masyarakat Wadas, kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta terjadinya perubahan dalam relasi sosial antara masyarakat dan pemerintah maupun antar masyarakat pro dan kontra itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab :

1. Bagaimana persepsi ketidakadilan sosial membentuk sikap penolakan masyarakat Desa Wadas terhadap proyek penambangan andesit, serta implikasinya terhadap relasi sosial masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Desa Wadas terhadap ketidakadilan sosial dalam proyek penambangan andesit
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat dalam proyek penambangan andesit
3. Memahami persepsi ketidakadilan sosial membentuk sikap dan penolakan masyarakat Desa Wadas terhadap proyek penambangan andesit
4. Mengkaji penolakan terhadap proyek penambangan andesit memengaruhi relasi sosial masyarakat Desa Wadas

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan dalam studi Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Politik. Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai konsep keadilan sosial

dalam studi Sosiologi, khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan konflik agraria melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Temuan ini akan membedah mekanisme di mana ketidakadilan ekonomi (redistribution), ketidakadilan pengakuan (recognition), dan ketidakadilan partisipasi (representation) berkaitan memicu dinamika sosial-politik masyarakat lokal. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur baru yang kokoh untuk menganalisis dan mengkritisi kasus serupa, yakni yang melibatkan dampak intervensi infrastruktur dan ketidakadilan multidimensi di wilayah lain.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menguntungkan masyarakat Desa Wadas sebagai dokumentasi sosial tentang pengalaman mereka dengan pembangunan yang memaksa. Penelitian dapat membantu masyarakat memahami kembali dinamika relasi sosial, ketimpangan yang pernah mereka alami, dan pentingnya memperjuangkan keadilan selama proses pembangunan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendorong generasi muda di desa dan masyarakat luas untuk lebih menyadari pentingnya pengakuan, partisipasi, dan keadilan untuk pembangunan di masa depan.

### b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan membantu pemerintah, baik di tingkat desa maupun pusat, dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan sosial dan partisipatif. Pemerintah dapat mempertimbangkan metode yang telah digunakan selama ini dengan mengetahui bagaimana masyarakat Desa Wadas saat penolakan penambangan andesit. Penelitian ini juga dapat menjadi kritik bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak sosial proyek pembangunan dan mendorong praktik pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan sosial-budaya masyarakat setempat.

c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penelitian ini dapat menjadi acuan LSM dalam membuat strategi yang lebih efektif untuk membantu memperjuangkankan hak-hak masyarakat dalam menghadapi pembangunan infrastruktur besar seperti PSN.

d. Bagi akademisi dan peneliti

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai keadilan sosial, konflik agraria, dan pembangunan dalam konteks pembangunan proyek infrastruktur besar. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam menggunakan analisis teori keadilan sosial oleh Nancy Fraser.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Komang Ariyanto dan Hamzah Al Imran (2023) dengan judul “Memahami Pembangunan Sosial Dibalik Pembangunan Waduk Lambo Di Nusa Tenggara Timur: Tinjauan Sosiologis”. Tujuan penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana pembangunan waduk mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, termasuk perubahan sosial, hubungan antarwarga, partisipasi sosial, dan konflik sosial yang mungkin terjadi saat pembangunan Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan waduk tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat dan interaksi antarwarganya. Penelitian ini menemukan ketidakpuasan masyarakat terhadap adanya pembangunan seringkali menimbulkan kontra. Oleh karena itu, manajemen pembangunan sosial diperlukan untuk mengatasi potensi konflik dan memastikan bahwa pembangunan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak melakukan wawancara langsung dengan masyarakat terdampak sehingga perspektif memungkinkan tidak

mewakili secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dkk (2021) dengan judul “Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial”. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji relasi kuasa diantara elit lokal dan pemerintah dalam mencegah konflik sosial pasca pemilihan kepala daerah. Urgensinya untuk meminimalisir konflik sosial untuk ketahanan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa antara elit lokal dan pemerintah dapat mempengaruhi penanganan konflik, konflik yang ada pasca pilkada memiliki dampak kerusakan hubungan pertemanan pada 4,3% untuk pemilihan presiden 2024 dan 5,7% untuk pilkada Jakarta 2017. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif eksploratif. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika konflik sosial, seperti adanya kebijakan pemerintah yang lebih luas/terbaru.<sup>28</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jafar Ahmad (2021) dengan judul “Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi (Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pulau Pandan Versus PLTA PT Kerinci Merangin Hidro di Kabupaten Kerinci)”. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan gambaran mendalam mengenai konflik sosial yang terjadi dengan korporasi besar, yaitu PT Kerinci Merangin Hidro dan masyarakat Desa Pulau Pandan. Masyarakat ini memiliki relasi sosial yang kuat dengan adat istiadat sehingga perlu dikaji berbagai karakteristiknya dan juga mengenai sikap masyarakat dengan kehadiran perusahaan yang menguasai sumber daya ekonomi mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan menimbulkan konflik sosial pada masyarakat yang sebelumnya hidup rukun dan damai. Perusahaan menghindari konfrontasi langsung dan memilih pendekatan yang humanis untuk mengelola sumber daya ekonomi karena memahami struktur sosial yang kuat di masyarakat Desa Pulau Pandan. Metode yang digunakan melalui

---

<sup>27</sup> Komang Ariyanto and Hamzah Al Imran, “Memahami Pembangunan Sosial Dibalik Pembangunan Waduk Lambo Di Nusa Tenggara Timur : Tinjauan Sosiologis” 6 (2023): 119–26.

<sup>28</sup> Fakultas Ilmu et al., “Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial” 27, no. 1 (2021): 39–64.

pendekatan studi kasus, dengan wawancara, dokumen, dan tinjauan literatur. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak adanya analisis mengenai dampak dalam jangka panjang maupun melihat bagaimana resolusi konflik akan dicapai.<sup>29</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Laha dkk (2021) dengan judul “Kehidupan Pasca Konflik dan Ketegangan Relasi Sosial: Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust”. Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai hubungan sosial masyarakat Poso pasca konflik dan relasi sosial antar etnik di Biak Papua, fokus penelitian yaitu pada konflik dan ketegangan yang mempengaruhi modal sosial dan kepercayaan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca konflik masyarakat Poso mengalami kerenggangan dalam hubungan sosialnya. Di Biak, relasi sosial dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan etnisitas. Meskipun dalam faktor ekonomi terdapat dinamika yang positif namun stereotip etnis tetap ada yang mempengaruhi hubungan sosial tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu mix method, dengan pengumpulan data kuantitatif melalui survei dan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Kelemahan dari penelitian ini yaitu fokus yang terbatas ada dua lokasi, yaitu Poso dan Biak.<sup>30</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk (2022) dengan judul “Kepemimpinan dan Stabilitas Relasi-Relasi Sosial di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai aspek-aspek kepemimpinan khususnya dampak kepemimpinan terhadap hubungan sosial antara lembaga dan masyarakat. Konflik juga dikaji untuk mengidentifikasi penyebabnya, yaitu kurangnya transparansi dan interaksi sosial antara lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan interaksi sosial yang buruk antara pemimpin dan lembaga menyebabkan konflik di Negeri Laha. Hubungan sosial dan kepemimpinan sangat erat kaitannya

---

<sup>29</sup> Jafar Ahmad, “Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi ( Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pulau Pandan Versus PLTA PT Kerinci Merangin Hidro Di Kabupaten” 2, no. 2 (2021): 107–21.

<sup>30</sup> M Saleh Laha et al., “Kehidupan Pasca Konflik Dan Ketegangan Relasi Sosial : Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust,” no. 2 (2021): 109–18.



dengan stabilitas. Hubungan sosial yang baik dapat menghasilkan kemajuan besar, sedangkan hubungan yang buruk dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Kelemahan dari penelitian ini yaitu tidak adanya data dari semua lembaga yang ada di Negeri Laha, terutama lembaga yang tidak mampu mengatasi konflik internal.<sup>31</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Soeharto dkk (2021) dengan judul “Peran Relasi Sosial sebagai Mediator antara Dukungan Sosial dengan Konflik Pekerjaan-Keluarga”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana dukungan sosial dari suami dan keluarga memiliki pengaruh terhadap ibu yang bekerja. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan konsep komunal dan kesetaraan untuk mempertimbangkan relasi sosial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai dukungan keluarga tidak selalu sejalan dengan harapan dan dapat dipengaruhi oleh norma budaya. Dalam penelitian ini dukungan sosial dari suami mempunyai pengaruh positif dalam menurunkan konflik, namun ini tidak langsung mempengaruhi relasi. Sebaliknya, dukungan sosial dari keluarga meningkatkan konflik, karena semakin tinggi dukungan semakin banyak konflik yang terjadi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan survei korelasional dengan 297 subjek. Kelemahan dari penelitian ini yaitu keterbatasan subjek yang tidak mempertimbangkan variable lain seperti jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.<sup>32</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agung Wardana (2022) dengan judul “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami proyek strategis nasional dari sudut pandang geografi hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum mempengaruhi proses pembuatan ruang baru untuk sirkulasi kapital dan implikasinya terhadap keadilan ruang bagi masyarakat yang tinggal di ruang tersebut. Hasil dari

---

<sup>31</sup> Kiki Rahayu dkk, “Kepemimpinan Dan Stabilitas Relasi-Relasi Sosial Di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” 5, no. 2 (2022): 128–36.

<sup>32</sup> Jurnal Psikologi Ilmiah, “Peran Relasi Sosial Sebagai Mediator Antara Dukungan Sosial Dengan Konflik Pekerjaan-Keluarga” 13, no. 2 (2021): 223–34.

penelitian menunjukkan bahwa ada tiga masalah utama keadilan ruang yang muncul selama proyek pembangunan Bendungan Bener: pengakuan, partisipasi, dan distribusi. Studi ini menemukan bahwa ketidakadilan yang dialami warga Desa Wadas berhubungan dengan pengakuan hak-hak mereka, partisipasi mereka dalam proses perencanaan, dan ketidakadilan dalam pembagian dampak dan keuntungan proyek. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya warga untuk mendapatkan keadilan sering kali ditentang oleh represivitas aparat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan sosio-legal. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan geografi, jadi analisis relasi sosial belum terungkap.<sup>33</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fazri Hasan Suhanto dan Rina Martini (2023) dengan judul “Dinamika Konflik Pertambangan dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo 2015-2023”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis adanya pelanggaran hak asasi manusia dan dampak-dampak yang dialami masyarakat Wadas akibat penambangan andesit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi muncul karena adanya kebijakan yang tidak adil dari pemerintah terhadap masyarakat. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui wawancara dan observasi di lapangan. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penelitian tidak menekankan pada dinamika relasi sosial sehingga tidak dapat mencerminkan kompleksitas relasi dan keadilan sosial dalam konflik Wadas.<sup>34</sup>

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Elvira Rumkahu (2022) dengan judul “Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistensi Papua”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana kegiatan pembangunan dan penerapannya telah memberi makna terhadap identitas Papua serta memahami relasi antara pembangunan dan konflik yang terjadi disana.

---

<sup>33</sup> Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo , Jawa Tengah.”

<sup>34</sup> Muhammad Fazri Hasan Suhanto and Rina Martini, “Dinamika Konflik Pertambangan dan Pelanggaran HAM : Studi Kasus Konflik Tambang Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023,” *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2020): 809–20, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43145/0>.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik karena pembangunan dianggap sebagai suatu ketidakadilan bagi masyarakat. Penolakan yang terjadi dipicu oleh adanya pelanggaran HAM, diskriminasi, dan aspirasi politik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Kelemahan dari penelitian ini yaitu minimnya perspektif masyarakat adat meskipun ada pengakuan terhadap adanya masyarakat adat.<sup>35</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Miftah Faridl Widhagdha dan Rahmad Hidayat (2020) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana upaya PT Pertamina dalam meningkatkan ikatan sosial dan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan PT Pertamina dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi konflik sosial dengan adanya terwujudnya relasi sosial yang baik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kelemahan dari penelitian ini yaitu kurangnya triangulasi data yang hanya berfokus kepada observasi dan Focus Group Discussion.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dari penelitian terdahulu terletak pada topik yang dikaji, yaitu mengenai konflik sosial yang terjadi akibat adanya proyek pembangunan. Lalu perbedaan terletak penambahan aspek yang dikaji, yaitu keadilan sosial dalam dinamika relasi masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini juga akan memakai analisis teori yang berbeda yaitu menggunakan teori keadilan sosial oleh Nancy Fraser.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Keadilan Sosial**

Keadilan sosial merupakan konsep utama dalam ilmu sosial yang

---

<sup>35</sup> Elvira Rumkabu, “Analisa Dampak Pembangunan Terhadap Identitas Dan Resistansi Papua,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2022, 39–55, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5975.39-55>.

menekankan pentingnya distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan secara merata bagi seluruh anggota masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penghidupan tanpa diskriminasi yang berbasis identitas sosial apa pun. Dalam teori keadilan kontemporer, persoalan ketimpangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan kekuasaan dan pengakuan. Ketiganya saling berkaitan dan menciptakan bentuk ketidaksetaraan yang kompleks. Nancy Fraser, salah satu ahli dalam pemikiran ini, melihat keadilan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi sekaligus marginalisasi identitas dan budaya kelompok tertentu. Bagi Fraser, keadilan tidak cukup hanya dalam bentuk distribusi material, tetapi juga harus menjamin pengakuan terhadap keberagaman dan partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan.<sup>36</sup>

#### **b. Relasi Sosial**

Relasi sosial merupakan hubungan yang terjalin antarindividu maupun antarkelompok melalui proses interaksi sosial yang saling memengaruhi. George Hillery menyebutkan bahwa relasi sosial terbentuk di antara sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga tercipta pengenalan, keterhubungan, dan pola hubungan yang terus berlangsung dalam kehidupan berkelompok. Interaksi sosial sendiri merupakan proses timbal balik antara individu dan kelompok, yang mendorong terjadinya tindakan sosial. Dalam menjalani kehidupan sosialnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Maka dari itu, relasi sosial menjadi bagian penting dalam membentuk

---

<sup>36</sup> Nancy Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," *Culture and Economy after the Cultural Turn*, 1998, 25–52, <https://doi.org/10.4135/9781446218112.n2>.

jaringan sosial, sistem nilai, hingga pola solidaritas di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, relasi sosial dilihat dari bagaimana hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah berubah setelah terjadinya konflik penolakan tambang di Desa Wadas.<sup>37</sup>

Dalam Sosiologi, teori konflik memiliki salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis tidak meratanya distribusi kekuasaan dan perbedaan kepentingan di dalam struktur sosial. Menurut Ralf Dahrendorf dalam teorinya, yang paling utama yaitu mengidentifikasi peran otoritas dalam masyarakat, masyarakat dibagi menjadi dua yaitu superordinat (berkuasa) dan subordinat (termarginalkan/dikuasai).<sup>38</sup> Dalam melihat kasus di Desa Wadas, teori konflik akan menganalisis ketegangan yang terjadi. Pemerintah sebagai superordinat memiliki kekuasaan dan tugas untuk membangun Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Bendungan Bener, masyarakat sebagai subordinat sebagai pihak yang terdampak dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan proyek.<sup>39</sup>

## 2. Teori Keadilan Sosial

Nancy Fraser merupakan seorang filsuf dan ilmuwan politik kontemporer yang banyak dikenal karena kontribusi gagasan-gagasannya mengenai keadilan sosial yang bersifat multidimensi. Fraser memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan keadilan tradisional yang hanya berfokus pada ekonomi seperti ketimpangan kelas saja. Menurutnya, bentuk-bentuk ketidakadilan tidak bisa dipahami dari satu sisi saja, dalam masyarakat modern yang mulai kompleks, ketidakadilan perlu dipahami dalam bentuk yang saling

---

<sup>37</sup> Mutmainna Bachrir, Zelfia, and Ahdan, "Pergeseran Relasi Sosial Akibat Teknologi Komunikasi Dimasa Pandemi Covid-19 Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia (Shifting Social Relations Due To Communication Technology During The Covid-19 Pandemic Student Of The Faculty Of Letters In," *RESPON: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 3 (2022): 52–62, <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/73>.

<sup>38</sup> Yogi Prana Izza, "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf" 9, no. 1 (n.d.): 41–55.

<sup>39</sup> Konflik and Ralf.

terkait antara ketimpangan ekonomi, pengabaian identitas budaya, dan minimnya ruang partisipasi politik. Bagi Fraser, keadilan tidak akan cukup jika hanya berbicara mengenai siapa yang mendapatkan apa, namun juga perlu diakui keberadaannya, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dalam kerangka teorinya, Fraser menjelaskan bahwa keadilan sosial awalnya hanya mencakup dua aspek utama yaitu distribusi dan pengakuan. Distribusi mengacu pada sumber daya secara adil, mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Adil berarti memastikan bahwa distribusi kekayaan dan manfaat pembangunan berlangsung secara setara. Sementara itu, pengakuan berkaitan dengan budaya dan identitas. Ketika suatu kelompok dianggap lebih rendah atau tidak dihargai maka terjadi ketidakadilan dalam bentuk pengabaian sosial. Namun, dalam perkembangannya, Fraser menyadari bahwa dua aspek utama tersebut belum cukup kuat karena banyaknya kasus ketidakadilan yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi dan pengakuan saja, tapi juga melibatkan partisipasi. Fraser dalam publikasinya yang berjudul "*Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation*" menyebutkan bahwa ketiga aspek ini harus saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri agar mewujudkan keadilan yang efektif dan mencerminkan pengalaman nyata masyarakat.<sup>40</sup>

Fraser menyebutkan bahwa keadilan sosial yang utuh hanya akan terwujud jika masyarakat mencapai *participatory parity*, yaitu ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya tanpa memperoleh penindasan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Konsep ini menguatkan bahwa keadilan sosial tidak hanya tentang memberikan sumber daya atau mengakui identitas, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang diberikan kesempatan dan didorong untuk berpartisipasi secara setara dalam aktivitas kehidupan sehari-hari

---

<sup>40</sup> Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation."



mereka.<sup>41</sup> Dari ketiga aspek tersebut kemudian menjadi satu kesatuan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini.<sup>42</sup>

**a. *Redistribution/Distribusi***

Distribusi adalah aspek keadilan sosial yang memiliki fokus pada pemerataan sumber daya, kekayaan, dan kesempatan agar seluruh masyarakat dapat memiliki partisipasi yang setara dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Ketidakadilan distributif muncul ketika pembagian sumber daya tidak merata, sehingga ada kelompok yang diuntungkan dan ada kelompok lain yang semakin termarginalkan. Dengan kata lain, distribusi yang timpang bisa menyebabkan sebagian besar beban pembangunan ditanggung oleh masyarakat, sementara manfaatnya hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Aspek ini memiliki akar historis dalam tradisi liberal Anglo-Amerika pada akhir abad ke-20, lalu diperkaya oleh John Rawls dan Ronald Dworkin. Para ahli menggabungkan kebebasan individu ala liberalisme dengan prinsip egalitarianisme sosial-demokrasi dengan tujuan merumuskan konsep keadilan distributif yang dapat sesuai dengan kebijakan distribusi sosial-ekonomi. Namun, Fraser mengembangkan gagasan ini lebih jauh dengan menekankan bahwa distribusi harus dipahami bersama dengan dimensi lain, yaitu pengakuan dan partisipasi.

Dalam kasus Wadas, peneliti melihat terdapat ketidakadilan distribusi disana yang ditandai dengan pembagian manfaat pembangunan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi tidak dilakukan dengan merata. Fraser menyebut ketidakadilan distribusi sebagai bentuk maldistribusi, yang mana ini mengakibatkan munculnya eksploitasi atau perampasan yang dapat menempatkan masyarakat dalam posisi lemah dalam struktural. Keadilan distributif diperlukan agar mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan. Dalam kasus

---

<sup>41</sup> Dorothee Holscher and Michalinos Zembylas Vivienne Bozalek, *Nancy Fraser and Participatory Parity*, Routledge Taylor & Francis Group, vol. 16, 2020.

<sup>42</sup> Norbertus JegalusOktovianus Kosat Yulianus Junin, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Tahrir : Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 5 (2024): 254–59.

Wadas, penambangan andesit untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional membawa dampak yang tidak merata. Sebagian masyarakat yang lahannya diambil tetap menerima UGR, namun nilai tersebut nyatanya tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Lahan bukan hanya aset ekonomi, tapi juga sumber penghidupan melalui perkebunan untuk menopang kehidupan keluarga. Kehilangan lahan berarti kehilangan mata pencaharian, bahkan memiliki dampak berkurangnya sumber mata air bersih dan kerusakan ekosistem. Sementara manfaat proyek lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak eksternal yang memiliki posisi lebih dominan. Oleh karena itu, distribusi menjadi kunci untuk memahami bagaimana pembangunan yang tidak disertai pembagian manfaat secara adil justru akan memperlebar kesenjangan dan memperkuat ketidaksetaraan struktural.<sup>43</sup>

**b. *Recognition*/Pengakuan**

Pengakuan merupakan salah satu aspek utama keadilan sosial selain distribusi. Jika distribusi mengenai akses ekonomi dan sumber daya, maka pengakuan berkaitan dengan identitas, status sosial, dan penghargaan budaya. Secara etimologis, istilah *recognition* dalam bahasa Inggris memiliki arti sesuatu yang sah atau benar, sehingga kita dapat mengetahui bahwa pengakuan bukan hanya soal apresiasi simbolik, namun berkaitan dengan pengetahuan, pengenalan, serta legitimasi yang bersifat relasional maupun legal. Fraser dalam karyanya yang berjudul *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*, menyatakan bahwa tujuan dari pengakuan adalah memastikan bahwa identitas kultural semua orang dihormati sehingga tidak ada marginalisasi atau diskriminasi yang memunculkan *misrecognition*/ketidakpengakuan. Misalnya, ketika identitas atau cara hidup kelompok dipandang tidak penting, maka sama artinya kelompok tersebut diberikan penghalang untuk berpartisipasi dalam aspek

---

<sup>43</sup> Fraser, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation."

sosial, politik, bahkan budaya, padahal prinsip keadilan Nancy Fraser yaitu menciptakan *participatory parity*.

Dalam pandangan Fraser, ketidakadilan dapat muncul dalam bentuk ekonomi maupun budaya. Ketidakadilan ekonomi menuntut adanya restrukturisasi politik-ekonomi, dalam kasus Wadas diharapkan tidak ada penguasaan tanah dan timpangnya distribusi manfaat pembangunan. Di sisi lain, ketidakadilan budaya menuntut adanya perubahan pola representasi dan komunikasi, seperti penghargaan terhadap budaya. Dalam kasus Wadas, ketidakadilan dari sisi pengakuan dapat dilihat dari penolakan terhadap tambang kerap dianggap sebagai sikap anti-pembangunan atau melawan negara, padahal sesungguhnya yang masyarakat perjuangkan adalah identitas dan keberlanjutan cara hidup yang sudah lama terikat. Aspirasi yang mereka suarkan dipandang sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai ekspresi sah dari identitas dan cara hidup mereka. Hal ini membuat masyarakat seolah tidak diakui sebagai subjek yang setara dalam pengambilan keputusan dan identitasnya sebagai masyarakat yang sudah memiliki keterikatan dengan tanah mereka.<sup>44</sup>

### c. *Participation/Partisipasi*

Menurut Fraser, keadilan tidak hanya menyangkut mengenai distribusi ekonomi atau pengakuan identitas budaya, tetapi juga mengenai bagaimana individu maupun kelompok memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Partisipasi adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan meliputi aspirasi yang didengar, dipertimbangkan, dan mampu memengaruhi hasil keputusan. Untuk mencapai prinsip *participatory parity* memerlukan dua syarat utama:

#### 1. Syarat Material

Adanya distribusi sumber daya yang memadai sehingga

---

<sup>44</sup> Fraser.

masyarakat yang terdiri dari individu maupun kelompok memiliki kapasitas untuk berpartisipasi tanpa ketergantungan khusus.

## 2. Syarat Simbolik

Adanya pengakuan budaya dan identitas, sehingga masyarakat merasa dihargai serta diakui martabatnya di dalam masyarakat.

Dalam teori keadilan Fraser, partisipasi bukan sekedar pelengkap namun menjadi indikator penting dari keadilan sosial. Jika ada kesempatan berpartisipasi masyarakat dapat turut mengawasi, mengoreksi, dan menentukan arah kebijakan yang ditentukan oleh negara. Partisipasi yang adil memiliki kapasitas menjembatani aspek distribusi dan pengakuan, sehingga keduanya dapat berjalan bersama dan saling menguatkan. Di kasus Wadas, sosialisasi publik diciptakan namun suara masyarakat tidak benar-benar dipertimbangkan, seakan partisipasi dalam sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat hanyalah suatu formalitas. Hal ini dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan antara pemerintah yang mendominasi masyarakat. Tidak adanya *participatory parity* dapat dilihat dari kondisi material disana yaitu masyarakat yang tidak memiliki jaminan atas tanah dan ekonomi, sedangkan kondisi simbolik dapat dilihat identitas kultural mereka yang menganggap “tanah adalah warisan leluhur” tidak diakui. Dengan begitu, ketidakadilan masyarakat bukan hanya mengenai distribusi atau pengakuan, tetapi juga tidak adanya akses terhadap partisipasi politik yang sejajar. Partisipasi tidak hanya mengenai kehadiran, tetapi juga memberi kapasitas, pengakuan, dan kekuatan yang sama untuk menentukan arah pembangunan. Tanpa partisipasi yang inklusif, distribusi dan pengakuan tidak akan memiliki pondasi dan keadilan sosial hanya akan menjadi sebuah wacana yang tidak pernah direalisasikan.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan keadilan sosial dari Nancy Fraser menjadi sangat relevan untuk memahami pengalaman masyarakat Desa

---

<sup>45</sup> Fraser.

Wadas pasca penolakan terhadap penambangan andesit. Penolakan bukan hanya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap dampak lingkungan atau kerugian ekonomi, namun juga berkaitan dengan absennya pengakuan terhadap nilai hidup dan identitas kultural, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat menganggap hak mereka atas tanah, lingkungan, dan keberlanjutan hidup tidak hanya diabaikan, tetapi juga dirampas atas nama pembangunan. Dengan tiga aspek Fraser, penelitian ini diharapkan dapat menelaah bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai keadilan pasca konflik, serta bagaimana relasi sosial terbentuk dalam ketegangan sosial.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian alur terorganisir yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Ini merupakan upaya untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tersebut dengan memahami dan memecahkan masalah. Alur ini krusial untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>46</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian “Persepsi Ketidakadilan Sosial Masyarakat: Studi Kasus Penambangan Andesit dalam Proyek Bendungan Bener Desa Wadas, pendekatan kualitatif memungkinkan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif masyarakat dan pemerintah terkait ketidakadilan yang mereka rasakan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat berbagai perspektif berbagai pemangku kepentingan, yaitu masyarakat Desa Wadas, pemerintah daerah/pusat, dan aktivis gerakan sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

---

<sup>46</sup> Sina Ibnu, “Metodologi Penelitian,” *Widina Bhakti Persada Bandung*, 2022, 12–26.

fenomena melalui interpretasi dan analisis deskriptif.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian dengan mempelajari suatu peristiwa atau kasus secara mendalam dan dalam batasan waktu dan aktivitas tertentu saja.<sup>47</sup> Kasus Wadas dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, memiliki kasus spesifik yaitu konflik pembangunan infrastruktur PSN dengan kompleksitas sosialnya. Peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan sosial, bagaimana keadilan dimaknai, melihat respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, hingga mengetahui bagaimana relasi sosial di Desa Wadas yang berubah pasca penolakan penambangan. Konteks waktu yang ada menjadi batasan penelitian bahwa penelitian ini hanya akan berfokus pada perubahan relasi sosial pasca penolakan penambangan andesit.

## **3. Subjek dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, desa yang berbatasan dengan Desa Pekacangan, Desa Kaliwader, Desa Kedungloteng, dan Desa Cacaban Kidul. Wadas memiliki luas desa 404.765 Ha dan diinformasikan akan menjadi lokasi penambangan andesit untuk proyek pembangunan Bendungan Bener yang di rencanakan berada di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa lokasi pertambangan andesit di lakukan di Desa Wadas, yaitu karena jarak yang ditempuh antara lokasi penambangan(Desa Wadas) dan rencana proyek pembangunan bendungan(Desa Guntur) yang tidak

---

<sup>47</sup> John W Creswell, "Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research," *Microbe Magazine* 4, no. 11 (2009): 485–485, <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>.



terlalu jauh sekitar 10 – 11 km.<sup>48</sup> Desa Wadas dipilih sebagai lokasi penelitian karena mengingat kasus penolakan wadas merupakan isu nasional yang masih sangat hangat hingga sekarang ini.<sup>49</sup> Hal ini memberikan kesempatan agar mendapatkan topik penelitian mutakhir, khususnya dalam perspektif sosiologi yang mengkaji mengenai ketidakadilan dan implikasinya terhadap relasi sosial. Keinginan peneliti mengkaji topik tersebut karena melihat adanya ketidakadilan yang mempengaruhi dinamika relasi sosial yang ada antara masyarakat dan pemerintah sehingga lokasi ini diharapkan dapat memberikan studi kasus tentang ketidakadilan sosial dalam proyek pembangunan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diambil secara langsung dari sumber asli. Data penelitian ini diberikan langsung kepada orang yang mengumpulkan data.<sup>50</sup> Sumber data didapatkan berdasarkan oleh hasil wawancara peneliti dengan informan yang sesuai dengan kategorisasi aktor, yaitu masyarakat Desa Wadas, pemerintah daerah/pusat, dan aktivis gerakan sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data yang dalam pengumpulannya tidak secara langsung diberikan kepada orang yang mengumpulkan data.<sup>51</sup> Sumber data sekunder didapatkan oleh peneliti melalui jurnal maupun buku-buku yang kredibel dan juga informasi berita mengenai topik

---

<sup>48</sup> Anasari and Harsono, “Dinamika Konflik Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.”

<sup>49</sup> Muhamad Fathan Mandela Mandela, “Konflik Negara Dan Masyarakat: Isu Wadas Dalam Prespektif Politik Kewargaan,” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 30–37, <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.10974>.

<sup>50</sup> Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2020.

<sup>51</sup> Mouwn Erland.

terkait.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data saat penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara sebagai sarana pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memerlukan pendekatan langsung dan interaktif antara peneliti dan individu yang sedang dipelajari. Tujuan utama wawancara kualitatif adalah untuk mengkaji secara mendalam pengalaman, sudut pandang, dan perspektif masyarakat dalam kaitannya dengan fenomena spesifik yang sedang dikaji. Bergantung pada struktur penelitian yang telah ditentukan, wawancara dapat dilakukan dalam format terstruktur dan semi-terstruktur untuk menguatkan analisis dan memberikan konteks yang lebih detail dan jelas.<sup>52</sup> Terdapat tiga aktor utama dalam penelitian ini selaku pemangku kepentingan.

Dalam pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria informan dalam penelitian sebagai berikut:

#### 1) Masyarakat Desa Wadas

Untuk mendapatkan pandangan, tanggapan, dan pengalaman masyarakat mengenai penolakan penambangan dan bagaimana masyarakat melihat keadilan sosial dalam kasus ini.

Kriteria informan dari sektor masyarakat:

- a) Masyarakat yang secara langsung terdampak oleh proyek tambang andesit untuk Bendungan Bener

---

<sup>52</sup> Bruce B. Frey, "Semi-Structured Interview," *The SAGE Encyclopedia of Research Design*, 2022, <https://doi.org/10.4135/9781071812082.n555>.

- b) Masyarakat yang terlibat dalam penolakan proyek tambang
- c) Berbagai latar belakang dan usia agar mendapatkan informasi yang lebih komprehensif

## 2) Pemerintah daerah/pusat

Untuk mendapatkan informasi mengenai regulasi, kebijakan, dan keputusan terkait proyek tambang. Perspektif pemerintah diperlukan untuk menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur PSN dan bagaimana pemerintah menanggapi dan menangani penolakan masyarakat.

Kriteria informan dari sektor pemerintah:

- a) Pejabat pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan proyek tambang
- b) Perwakilan yang memahami dan bertanggung jawab atas PSN
- c) Memiliki pemahaman dan pengalaman dalam bidang kebijakan publik dan infrastruktur

## 3) Gerakan sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat

Untuk mendapatkan informasi dan pandangan mengenai advokasi dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan dukungan dalam kasus Wadas. Menggali lebih banyak terkait upaya yang dilakukan Gerakan Sosial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Kriteria informan dari sektor LSM:

- a) Aktivis yang secara langsung terlibat dalam aksi penolakan tambang di Desa Wadas
- b) Perwakilan dari Gerakan Sosial/LSM yang memiliki fokus pada hak asasi manusia, kebijakan publik, dan isu lingkungan.
- c) Memiliki pengalaman dalam aksi yang dihadapi dan melibatkan masyarakat

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan pengamatan langsung dari peneliti dan berbagai konteks yang terkait dengan topik penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan di lingkungan alami atau di lingkungan terkontrol yang secara khusus diatur untuk tujuan penelitian.<sup>53</sup> Melalui observasi ini, peneliti diberi kesempatan untuk mengamati interaksi antara masyarakat yang menolak proyek, serta menangkap tanggapan dari pemerintah terkait penolakan. Observasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi fisik dan sosial di lapangan dengan mengamati pada interaksi sosial, perilaku, dan berbagai aspek terkait.

c. Dokumen

Proses dokumen melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti dokumen, arsip, atau materi tertulis apa pun yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup catatan, laporan, surat, buku, atau catatan resmi lain.<sup>54</sup> Dengan teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen maupun laporan penting, publikasi berita maupun artikel dapat membantu memahami perkembangan penolakan.

Selama proses pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Peneliti dibantu oleh PS selaku salah satu tokoh yang saat adanya konflik penolakan, aktif di dalam komunitas GEMPADEWA. Lalu dari PS, peneliti dibantu untuk menjalin komunikasi dan dihubungkan dengan informan yang

---

<sup>53</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

<sup>54</sup> Ardiansyah, Risnita, and Jailani.

nantinya dapat memberikan data yang informatif. Perlu adanya *gatekeeper* karena peneliti menghadapi beberapa kendala, sebagai pihak luar yang meneliti disana peneliti mendapat kesulitan untuk mengakses informan yang terlibat dalam dinamika penolakan. Serta masih adanya sensitivitas isu dan pengalaman masyarakat membuat informan bersikap takut dalam memberikan informasi internal mereka, sehingga adanya *gatekeeper* membuat informan lebih mau terbuka dan percaya kepada peneliti.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Analisis Data Kualitatif<sup>55</sup>, analisis terdiri dari beberapa langkah :

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal penting yang didapatkan dari teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ketidakadilan terhadap proyek penambangan andesit, dan mempermudah agar data yang tidak relevan, informasi yang tidak memiliki keterkaitan, maupun aspek yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup fokus penelitian dapat dieliminasi atau disederhanakan. Proses reduksi dilakukan dengan transkripsi data kualitatif dan mengelompokkan temuan berdasarkan tema. Tahapan pertama yang dilakukan, transkripsi data, yaitu mengubah seluruh hasil wawancara mendalam dengan informan ke dalam bentuk tulisan.

---

<sup>55</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, vol. 1 (Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Transkrip wawancara ini digunakan untuk memahami konteks, makna, serta pengalaman informan secara menyeluruh. Tahapan kedua, *open coding*, ini adalah proses pemberian kode awal dari apa yang sudah disampaikan informan mengenai penolakan penambangan, persepsi ketidakadilan, hingga implikasinya terhadap relasi sosial. Penentuan kode ini tanpa pengelompokan yang kaku. Tahap ketiga, *axial coding*, yaitu mengelompokkan kode ke dalam kategori yang bermakna. Kategori dibentuk dengan melihat hubungan antar kode agar dapat menyusun struktur data yang terorganisir seperti hubungan antara UGR dengan polarisasi sosial. Tahap keempat, *selective coding*, yaitu pemilihan kategori inti yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Pada tahap ini, kategori dipilih dan dirangkai untuk membangun tema utama yang akan ditulis di penelitian, seperti bentuk-bentuk ketidakadilan, persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial, hingga relasi sosial pasca penolakan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data menjadi tahapan dalam menyusun data yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang disajikan adalah jenis data kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat deskriptif mengenai persepsi ketidakadilan yang dialami masyarakat Desa Wadas pasca penolakan tambang. Proses penyajian data akan menggunakan teknik koding berdasarkan kategorisasi seperti, distribusi, pengakuan, dan partisipasi.

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses pemaknaan atas apa yang dilakukan, baik berupa benda, proses, sebab akibat, pola, keteraturan, penjelasan sebagai kesimpulan dari penelitian. Analisisnya melalui hasil reduksi dan penyajian data dengan teori keadilan sosial Nancy Fraser. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya memberi gambaran dinamika konflik, namun juga tentang cara masyarakat memaknai



keadilan dan merespon ketimpangan. Hal ini agar mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai struktur ketidakadilan dan praktik perlawanan masyarakat dalam konteks pembangunan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan laporan proposal ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan hingga perlu dilakukannya penelitian ini, maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, analisis peneliti untuk menemukan subjektivitas penelitian dalam permasalahan yang ingin diteliti sehingga dapat menemukan data riil sebagai bukti adanya keterikatan dengan topik yang diambil.

Tinjauan Pustaka berisikan mengenai berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi akibat adanya proyek pembangunan.

##### **BAB II Gambaran Umum Setting Penelitian**

Berisikan konteks penelitian secara umum. Gambaran umum berisikan mengenai lokasi/setting penelitian berupa kondisi umum lokasi penelitian yaitu di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

##### **BAB III Pemaparan Hasil**

Berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut. Menjelaskan rumusan masalah yang telah ditentukan dengan sumber referensi yang digunakan, data wawancara, observasi, dan dokumen.

##### **BAB IV Pembahasan dan Analisis**

Berisikan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan mengaitkan pada teori dan tinjauan pustaka, meliputi hasil pengamatan langsung di lapangan dan data hasil wawancara yang dilaksanakan di Desa Wadas sebagai inti pembahasan mengenai persepsi ketidakadilan sosial masyarakat.

## **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai peningkatan pemahaman tentang dinamika sosial dan keadilan dalam proyek pembangunan suatu negara. Studi kasus yang ada tidak hanya berdampak pada relasi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga pada dinamika keadilan yang meliputi beberapa aspek, seperti distribusi, pengakuan, dan partisipasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana relasi dan keadilan sosial di Desa Wadas terbentuk pasca penolakan tambang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dilaksanakan dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumen, analisis akan menggunakan teori keadilan sosial Nancy Fraser. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa apa yang terjadi di Wadas dipengaruhi oleh ketidakadilan-ketidakadilan yang sifatnya multidimensi, meliputi *maldistribution*, *misrecognition*, dan *misrepresentation*.

Dari Hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Relasi sosial**, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konflik tambang andesit menciptakan perubahan dalam struktur sosial masyarakat, yaitu polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu pro dan kontra. Perbedaan yang ada di masyarakat didasarkan atas perbedaan kepentingan, pemerintah desa/masyarakat pro berdasar pada pemikiran untung yang akan didapat serta tuntutan Proyek Strategis Nasional yang perlu dijalankan. Sedangkan masyarakat kontra berdasar pada pemikiran jangka panjang kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga adanya perbedaan kepentingan tersebut relasi dalam masyarakat menjadi tegang dan tidak netral lagi. Namun dalam kasus Wadas, relasi sosial tidak semua renggang. Ada sebagian masyarakat, khususnya yang kontra, justru memperkuat solidaritas internal mereka. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman yang sama dan rasa kebersamaan yang kuat. Dinamika ini menjelaskan bahwa dampak konflik tidak selalu bersifat destruktif, namun juga memunculkan keterikatan yang lebih solid pada kelompok tertentu.
2. **Aspek distribusi**, penelitian ini menemukan bahwa adanya mekanisme Uang Ganti Rugi(UGR) dengan tahap pencairan berbeda menimbulkan *maldistribution* dan ketimpangan baru pada masyarakat. Secara formal,

nominal UGR tidak dibedakan berdasarkan tahap pencairan melainkan disesuaikan dengan nilai aset yang perlu dikompensasi. Namun, di Wadas menunjukkan praktik tidak resmi berupa pemberian insentif yang dapat menggerakkan massa untuk berpartisipasi pada tahap pencairan awal. Hal ini menghancurkan kepercayaan kesetaraan prosedural dan memecah solidaritas yang ada pada masyarakat. UGR juga dinilai tidak adil karena tidak memiliki nilai yang sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat, yaitu hilangnya ruang hidup, keberlanjutan ekologis, serta mata pencaharian yang hilang. Dengan demikian, distribusi manfaat di Desa Wadas masih bersifat timpang karena beban secara tidak proporsional ditanggung masyarakat dan keadilan distribusi masih belum tercapai.

3. **Aspek pengakuan**, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpengakuan terhadap identitas, nilai budaya, hubungan spiritual masyarakat dengan tanah, serta perannya masing-masing dalam masyarakat dapat menimbulkan *misrecognition*. Bagi masyarakat Wadas, tanah bukanlah aset ekonomi yang dapat dikompensasi dengan tanah, namun sebuah simbol identitas budaya dan warisan leluhur. Ketidakmampuan pemerintah mengakomodasi aspek budaya masyarakat membuat masyarakat merasa dipinggirkan dan distigmatisasi sebagai “penghambat pembangunan”. Ketidakadilan yang tidak mengakomodasi jenis kelamin juga membuat kebijakan tidak dapat menangkap perbedaan pengalaman, peran sosial, serta beban yang dirasakan masyarakat. Perbedaan ini menjadi penting karena risiko yang dialami masyarakat tidak bersifat seragam dan berkaitan dengan peran sosialnya masing-masing. Kondisi ini sesuai dengan analisis Fraser bahwa *misrecognition*, dapat menghambat partisipasi masyarakat karena menghilangkan legitimasi moral dari aspirasi penolakan mereka.
4. **Aspek partisipasi**, penelitian ini menemukan bahwa proses keputusan terkait tambang tidak memberikan ruang setara bagi masyarakat sehingga menimbulkan *misrepresentation*. Dalam hal ini, di Wadas terdapat

ketidakadilan seperti informasi yang kurang transparan, sosialisasi publik yang hanya dijadikan formalitas, hingga minimnya ruang partisipasi untuk berdialog. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan tidak adanya *parity of participation* di Wadas sehingga aspirasi penolakan tereduksi bahkan tidak didengarkan. Kondisi ini muncul bukan hanya untuk menolak proyek namun juga tanda masyarakat memperjuangkan hak mereka dalam ruang partisipasi politik.

5. **Keadilan sosial multidimensi**, penelitian ini menjelaskan bahwa ketidakadilan di Wadas bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Temuan ini menegaskan bahwa konflik pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun juga pengakuan dan partisipasi. Temuan lain muncul yaitu adanya penguatan solidaritas di kalangan kelompok kontra, berbeda dengan konflik serupa yang cenderung menurunkan kohesi sosial secara keseluruhan. Dengan analisis Fraser, penelitian ini menegaskan bahwa tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna dapat menimbulkan ketidakadilan yang meluas dan berdampak pada struktur sosial masyarakat.

## **B. Sumbangan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis bagi Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Politik. Hasil dari penelitian memberikan pemahaman bahwa proyek pembangunan infrastruktur seperti penambangan andesit dapat memengaruhi relasi sosial serta menghasilkan dinamika keadilan sosial pasca konflik. Temuan ini memperluas kajian mengenai pembangunan dengan menunjukkan bahwa proses pembangunan yang bersifat *top-down* akan menciptakan ketegangan dan perubahan pada relasi. Sedangkan pada Sosiologi Politik, temuan ini akan memberikan kontribusi tambahan mengenai pola relasi, praktik representasi, dan respon masyarakat terhadap intervensi negara dalam ruang hidup mereka.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian mengenai pemetaan aktor, dinamika relasi sosial, serta pola perlawanan dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun lembaga lainnya dalam proses mediasi dan resolusi konflik yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hasil penelitian mengenai ketidakjelasan prosedural, pengabaian nilai budaya, serta ketimpangan partisipasi, dapat menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi dan dialog yang lebih inklusif untuk proyek pembangunan serupa kedepannya.
- b. Hasil penelitian mengenai *maldistribution*, *misrecognition*, dan *misrepresentation* dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adil. Penelitian ini menegaskan bahwa pelibatan masyarakat sejak perencanaan awal hingga transparansi informasi mengenai proses keputusan itu penting, sehingga penelitian dapat menjadi pengembangan model pembangunan yang tidak hanya melihat aspek fisik, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan sosial masyarakat.
- c. Bagi komunitas, penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi perlawanan masyarakat dan bentuk solidaritas sosial yang terbentuk, sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat advokasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat secara efektif.

## C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan secara teoritis karena hanya menggunakan satu kerangka besar, yaitu teori keadilan sosial Nancy Fraser. Meskipun teori ini dapat menjelaskan kompleksitas ketidakadilan secara multidimensional. Beberapa mengenai dinamika relasi sosial seperti pengalaman trauma, memori kolektif, dan praktik resistensi masyarakat, dapat diperkaya dengan analisis teori konflik maupun teori gerakan sosial.



2. Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis, yaitu keterbatasan jumlah informan. Situasi lapangan yang masih sensitif serta posisi peneliti sebagai pihak luar menyebabkan sulitnya akses informasi secara mendalam. Masyarakat itu sendiri masih enggan dan menyisakan ketakutan, narasi mungkin ada yang tidak disampaikan secara penuh karena informan yang masih cukup trauma.
3. Keterbatasan non-akademis, kondisi lapangan yang terus berkembang seiring proses Proyek Strategis Nasional membuat temuan penelitian hanya menangkap kondisi tertentu. Faktor keamanan dan juga mobilitas peneliti menjadi tantangan selama penelitian ini berlangsung.

#### **D. Saran**

1. Rekomendasi Akademis
  - a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan keadilan sosial oleh Nancy Fraser atau memperluasnya dengan pendekatan lain. Teori yang dapat digunakan misalnya teori gerakan sosial agar aspek penolakan dan pengalaman ekologis masyarakat dapat terbaca dengan lebih komprehensif.
  - b. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan aktor pemerintah agar memperluas pandangan mengenai pengambilan keputusan, komunikasi kebijakan, hingga hambatan birokratis yang tidak dapat digali dalam penelitian ini.
2. Rekomendasi Praktis
  - a. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme partisipasi substantif agar sosialisasi dalam proses pembangunan dapat berjalan dialogis.
  - b. Transparansi informasi mengenai perizinan tambang, pembuatan AMDAL, proses ganti rugi harus lebih diperkuat untuk menghindari ketidakpercayaan dan ketidakpastian yang akan dirasakan masyarakat. Penyediaan mediator independen dapat menjadi solusi memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

- c. Penting adanya program pendampingan sosial jangka panjang bagi masyarakat. Program ini berupa pemulihan trauma, penguatan kapasitas SDM mengenai financial, hingga penyediaan ruang dialog yang tidak intimidatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- 2021, BEM Akprind. “‘Tanah Surga’ Wadas Dijadikan Tambang: ‘Mengapa Pemerintah Menindas Petani?,’” n.d.
- 2023, Kasmiati et al. “PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan,” 2021, 167–86.
- Abidin, Benny. “Penolakan Warga Terhadap Proyek Pltu Batang: Telaah Sosiologi Hukum.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 134–44. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1095>.
- Advokasi, Kementerian Kajian Strategis Aksi dan. “Komoditas Wadas Bernilai Tinggi.” *BEMUMY*, n.d. <https://bem.umy.ac.id/data-center-katanya-tanah-surga-di-desa-wadas-surga-untuk-rakyat-atau-oligarki/>.
- Ahmad, Jafar. “Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi ( Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pulau Pandan Versus PLTA PT Kerinci Merangin Hidro Di Kabupaten” 2, no. 2 (2021): 107–21.
- Alwi, Habib. “Studi Pengantar Konflik Sosial Sebuah Tianjaun Teoritis,” 2016, 16.
- Anasari, Lusi, and Dwi Harsono. “Dinamika Konflik Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.” *Journal of Public Policy and Administration Research* 8, no. 4 (2023): 17.
- Andalas, Ilmu Politik FISIP Universitas. “Tinjauan Kritis Atas Proyek Strategis Nasional : Antara Kebijakan Strategis Atau Bencana Sosial Ekologis,” 2024. [https://ilmupolitik.fisip.unand.ac.id/berita/tinjauan-kritis-atas-proyek-strategis-nasional-antara-kebijakan-strategis-atau-bencana-sosial-ekologis/#:~:text=Selain berdampak pada Masyarakat%2C PSN,alam seperti erosi dan banjir.](https://ilmupolitik.fisip.unand.ac.id/berita/tinjauan-kritis-atas-proyek-strategis-nasional-antara-kebijakan-strategis-atau-bencana-sosial-ekologis/#:~:text=Selain%20berdampak%20pada%20Masyarakat%20PSN,alam seperti erosi dan banjir.)
- Andrianni, Suri, and Hadi Rianto. “Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2019): 166. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1439>.

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Ariyanto, Komang, and Hamzah Al Imran. "Memahami Pembangunan Sosial Dibalik Pembangunan Waduk Lambo Di Nusa Tenggara Timur : Tinjauan Sosiologis" 6 (2023): 119–26.
- Bachrir, Mutmainna, Zelfia, and Ahdan. "Pergeseran Relasi Sosial Akibat Teknologi Komunikasi Dimasa Pandemi Covid-19 Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia (Shifting Social Relations Due To Comunication Technology During The Covid-19 Pandemic Student Of The Faculty Of Letters In." *RESPON: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 3, no. 3 (2022): 52–62. <https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/73>.
- Diva Lufiana Putri, Sari Hardiyanto. "Profil Desa Wadas, Tambang Batu Andesit, Dan Polemik Bendungan Bener." *Kompas.Com*, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/10/180500265/profil-desa-wadas-tambang-batu-andesit-dan-polemik-bendungan-bener?page=all#:~:text=Desa Wadas terletak di bagian,hektar sisanya berupa tanah sawah.&text=Kawasan Desa Wadas sendiri terbelah,disediakan>.
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, and Moch Reski Fauzi. "Rekomendasi Resolusi Konflik Di Desa Wadas Menggunakan Metode Tinjauan Pustaka." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 1 (2023): 15–22. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v5i1.44113>.
- Fraser, Nancy. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation." *Culture and Economy after the Cultural Turn*, 1998, 25–52. <https://doi.org/10.4135/9781446218112.n2>.
- Frey, Bruce B. "Semi-Structured Interview." *The SAGE Encyclopedia of Research Design*, 2022. <https://doi.org/10.4135/9781071812082.n555>.
- Harmen, Ferry Andika. "Proyek Strategis Nasional, Dari Kita Untuk Bangsa." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/15970/Proyek-Strategis-Nasional-Dari-Kita-Untuk-Bangsa.html>.

“Hasil Wawancara BN, 02 Desember 2024.” n.d.

“Hasil Wawancara BS, 03 Desember 2024.” n.d.

“Hasil Wawancara MA, 16 September 2025.” n.d.

“Hasil Wawancara MF, 03 Desember 2024.” n.d.

“Hasil Wawancara MT, 02 Desember 2024.” n.d.

“Hasil Wawancara PS, 02 Desember 2024.” n.d.

Hukum, Jurnal, Politik Dan, Ilmu Sosial, Arief Fadillah Ramadhan, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and An Nissa Nabila. “Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener” 3, no. 2 (2024).

Ibnu, Sina. “Metodologi Penelitian.” *Widina Bhakti Persada Bandung*, 2022, 12–26.

Ilmiah, Jurnal Psikologi. “Peran Relasi Sosial Sebagai Mediator Antara Dukungan Sosial Dengan Konflik Pekerjaan-Keluarga” 13, no. 2 (2021): 223–34.

Ilmu, Fakultas, Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu, et al. “Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial” 27, no. 1 (2021): 39–64.

Indonesia, Presiden Republik. *Perpres No 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2023.

Indonesia, Republik. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” no. 050197 (2020).

John W Creswell. “Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Research.” *Microbe Magazine* 4, no. 11 (2009): 485–485.

<https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur,” 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-tekankan-pentingnya-pembangunan-infrastrukt>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional Yang Miliki Manfaat Besar Dan Berdampak Luas,” 2023. [https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional \(PSN,krisis global pada 2008-2012](https://ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN,krisis global pada 2008-2012).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM) 2020-2024.” *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*, 2020, 313. <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>.

Kiki Rahayu dkk. “Kepemimpinan Dan Stabilitas Relasi-Relasi Sosial Di Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon” 5, no. 2 (2022): 128–36.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Ringkasan Eksekutif Pemantauan Dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan ( Excessive Use of Force ) Dalam Proses Pengukuran Lahan Di Desa Wadas 8 Februari 2022.” *Komnasham*, no. 006/HM.00/II/2022 (2022): 2–3. [https://www.komnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-\\$YJR6AOIO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-$YJR6AOIO.pdf).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. “Bendungan Bener,” n.d. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/bendungan-dan-irigasi/bendungan-bener/>.

Laha, M Saleh, Fatmawada Sudarman, Moh Nutfa, Dosen Institut, and Ilmu Sosial. “Kehidupan Pasca Konflik Dan Ketegangan Relasi Sosial : Suatu Ancaman Kehancuran Social Capital Trust,” no. 2 (2021): 109–18.



- LBH Yogyakarta. “GEMPADEWA MENGGUGAT DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM DAN MELAWAN TAMBANG ILEGAL DI WADAS,” 2022. [https://lbhyogyakarta.org/2022/11/02/gempadewa-menggugat-dirjen-minerba-kementerian-esdm-dan-melawan-tambang-ilegal-di-wadas/#:~:text=Surat tersebut pada intinya memperbolehkan rencana pertambangan,tidak ditemukan klausul atau pasal yang memperbolehkan.](https://lbhyogyakarta.org/2022/11/02/gempadewa-menggugat-dirjen-minerba-kementerian-esdm-dan-melawan-tambang-ilegal-di-wadas/#:~:text=Surat%20tersebut%20pada%20intinya%20memperbolehkan%20rencana%20pertambangan,tidak%20ditemukan%20klausul%20atau%20pasal%20yang%20memperbolehkan.)
- Limanseto, Haryo. “Selain Menjadi Upaya Pemeratan Pembangunan Di Seluruh Wilayah, Proyek Strategis Nasional Juga Mampu Berikan Dampak Multiplier Effect.” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5631/selain-menjadi-upaya-pemeratan-pembangunan-di-seluruh-wilayah-proyek-strategis-nasional-juga-mampu-berikan-dampak-multiplier-effect>.
- Lukman Adam. “PENAMBANGAN DI DESA WADAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN,” 2022. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-237.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Februari-2022-237.pdf).
- Mandela, Muhamad Fathan Mandela. “Konflik Negara Dan Masyarakat : Isu Wadas Dalam Prespektif Politik Kewargaan.” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 1 (2024): 30–37. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.10974>.
- Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2020.
- N, Satria Ardhi. “Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat.” *Universitas Gadjah Mada*, 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.
- PBHI. “Tolak Tambang Harga Mati,” 2022. [https://pbhi.or.id/warga-wadas-mendesak-presiden-jokowi-untuk-menghapus-izin-penetapan-lokasi-tambang-di-desa-wadas/#:~:text=Warga menyampaikan bahwa berdasar hasil penilaian amdal,batuan andesit%2C Analisis resiko dilakukan tidak komprehensif.](https://pbhi.or.id/warga-wadas-mendesak-presiden-jokowi-untuk-menghapus-izin-penetapan-lokasi-tambang-di-desa-wadas/#:~:text=Warga%20menyampaikan%20bahwa%20berdasar%20hasil%20penilaian%20amdal,batuan%20andesit%2C%20Analisis%20resiko%20dilakukan%20tidak%20komprehensif.)
- “Perda 10 Tahun 2021” 4, no. 1 (2021): 6.

- Portal Informasi Indonesia. “233 Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024,” 2024.  
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8452/233-proyek-strategis-nasional-dorong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2024?lang=1>.
- Prioritas, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur. “Peran KPPIP,” n.d.  
<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/#>.
- Purworejo, BPS. “Jumlah Penduduk Kecamatan Bener, (Jiwa) 2023,” 2023.  
<https://purworejokab.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTk3IzI=/number-population-of-bener-subdistrict.html>.
- Purworejo, Pemkab. “Selain Penuhi Kebutuhan Air, Pembangunan Bendungan Bener Akan Berfungsi Sebagai Pengendali Banjir,” 2020.  
[https://www.purworejokab.go.id/web/read/1341/selain-penuhi-kebutuhan-air-pembangunan-bendungan-bener-akan-berfungsi-sebagai-pengendali-banjir.html?\\_\\_im-tlHVqanr=3939563989256812424&\\_\\_im-WjyqTccy=10880979142514869512](https://www.purworejokab.go.id/web/read/1341/selain-penuhi-kebutuhan-air-pembangunan-bendungan-bener-akan-berfungsi-sebagai-pengendali-banjir.html?__im-tlHVqanr=3939563989256812424&__im-WjyqTccy=10880979142514869512).
- Rinto Heksantoro. “Ditarget Kelar Akhir Tahun, Pembangunan Bendungan Bener Kini Mencapai 39%.” *DetikJateng*, 2024.  
<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7241971/ditarget-kelar-akhir-tahun-pembangunan-bendungan-bener-kini-mencapai-39>.
- Rumkabu, Elvira. “Analisa Dampak Pembangunan Terhadap Identitas Dan Resistansi Papua.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2022, 39–55.  
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5975.39-55>.
- Dewantara, Jalu Rahman. “Warga Wadas Jadi Miliarder, Ternyata UGR Bendungan Bener Jauh Di Atas NJOP.” *DetikJateng*, 2022. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095083/warga-wadas-jadi-miliarder-ternyata-ugr-bendungan-bener-jauh-di-atas-njop>.
- “Hasil Wawancara BS, 03 Desember 2024.” n.d.
- “Hasil Wawancara MA, 16 September 2025.” n.d.
- “Hasil Wawancara PS, 02 Desember 2024.” n.d.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Vol. 1. Penerbit Pustaka Ramadhan,

- Bandung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sejarot, Diyan, and Achmad Hariri. "Konflik Agraria Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ' Studi Kasus Desa Wadas Purworejo '" 2, no. 2 (2023): 151–66.
- Suhanto, Muhammad Fazri Hasan, and Rina Martini. "Dinamika Konflik Pertambangan Dan Pelanggaran HAM : Studi Kasus Konflik Tambang Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2020): 809–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43145/0>.
- T.Rahmawati, Wahyu. "Waskita Karya (WSKT) Kebut Proyek Bendungan Bener, Progresnya Sudah 60,26%," 2024. [https://investasi.kontan.co.id/news/waskita-karya-wskt-kebut-proyek-bendungan-bener-progresnya-sudah-6026#:~:text=Proyek Strategis Nasional \(PSN\) yang,sekitar Rp 571%2C2 miliar](https://investasi.kontan.co.id/news/waskita-karya-wskt-kebut-proyek-bendungan-bener-progresnya-sudah-6026#:~:text=Proyek Strategis Nasional (PSN) yang,sekitar Rp 571%2C2 miliar).
- Tempo.Co*. "Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan Dari Implementasi PSN." 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/nalar-institute-ungkap-deretan-dampak-negatif-sosial-lingkungan-dari-implementasi-psn-408665>.
- "UU NO 2 Tahun 2012" 66, no. 3 (2012): 37–39.
- Vivienne Bozalek, Dorothee Holscher and Michalinos Zembylas. *Nancy Fraser and Participatory Parity*. Routledge Taylor & Francis Group. Vol. 16, 2020.
- Wardana, Agung. "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional : Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo , Jawa Tengah" 5, no. 1 (2022): 1–41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>.
- Yogi Prana Izza. "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf" 9, no. 1 (n.d.): 41–55.
- Yulianus Junin, Norbertus JegalusOktovianus Kosat. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Tahrir : Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 5 (2024): 254–59.